

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan ini berisi tentang kerangka konseptual maupun landasan teori yang menjadi pijakan peneliti ketika melakukan penelitian. Untuk menyusun tinjauan pustaka perlu adanya usaha dalam mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain sumber tersebut harus yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Jadi kesimpulannya dalam menyusun tinjauan pustaka ini sama halnya dengan mencari penelitian terdahulu untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang topik yang akan diteliti. Selain itu, tujuan menyusun tinjauan pustaka yaitu untuk menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi ketika memulai sebuah penelitian.

##### **2.1.1 Kemiskinan**

###### **2.1.1.1 Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana secara ekonomi tidak dapat memenuhi taraf kehidupan seseorang secara umum di suatu daerah tersebut. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan kemampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Potensi pendapatan rendah ini juga berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk mencapai standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Selama ini pertumbuhan ekonomi dianggap menjadi tujuan pembangunan. Namun pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kekayaan sumberdaya alam melimpah tidak menjadi jaminan rendahnya angka kemiskinan. Hal yang penting adalah kemiskinan tidak mudah diturunkan dalam waktu yang singkat karena pengalaman kecepatan menurunkan kemiskinan diberbagai negara umumnya kurang dari 2% per tahun. Maka penurunan jumlah penduduk miskin tidak bisa *instant* tetapi terencana, bertahap dan berkelanjutan dan memerlukan kerja sama diberbagai jenjang, mulai dari tingkat lokal, nasional, regional maupun global (Girsang, 2011:78).

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Adapun pendapat Chambers dalam Listyaningsih (2018) mengenai definisi kemiskinan adalah suatu *integrated concept* secara arti luas yaitu yang memiliki lima dimensi, diantaranya:

- 1). Kemiskinan (*poverty*)

Perspektif nyata tentang masalah keadaan kemiskinan yang ada adalah dimana pendapatan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Konsep atau pendekatan ini tidak hanya berlaku untuk kelompok tanpa penghasilan, tetapi dapat berlaku untuk kelompok yang memiliki pendapatan.

2). Ketidakberdayaan (*powerless*)

Secara umum, kapasitas pendapatan yang lebih kecil akan terpengaruh kekuatan sosial individu atau kelompok (*social power*) terutama untuk mendapatkan keadilan atau persamaan hak kehidupan yang baik untuk kemanusiaan.

3). Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

Individu atau kelompok yang disebut miskin, atau kemampuan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga dimana kondisi ini memerlukan alokasi pendapatan untuk mengatasi situasi ini. Misalnya, situasi rentan bencana alam, kondisi kesehatan yang memburuk membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, keadaan darurat lainnya yang membutuhkan kapasitas penghasilan yang memadai. Kondisi kemiskinan dianggap tidak memadai dalam menghadapi situasi ini.

4). Ketergantungan (*dependence*)

Individu atau kelompok masyarakat yang dianggap miskin memiliki keterbatasan kapasitas pendapatan dan kekuatan sosial, sehingga sangat bergantung pada pihak lain. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau memecahkan masalah. Secara khusus, yang terkait dengan pendapatan baru. Untuk mengatasi masalah, dukungan dari pihak lain, terutama yang terkait dengan kebutuhan aliran pendapatan sangat dibutuhkan.

5). Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Dimensi keterasingan sebagaimana didefinisikan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan atau sekelompok menjadi miskin. Umumnya mereka yang disebut miskin ini tinggal di daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena sebagian besar lembaga kesejahteraan cenderung fokus pada pusat pertumbuhan ekonomi seperti wilayah perkotaan dan kota-kota besar, masyarakat yang berpenduduk di daerah terpencil dan daerah dengan akses layanan sosial yang buruk memiliki standar hidup yang relatif rendah yang berkontribusi terhadap kemiskinan.

Menurut Mukhamad (2018) dan Prawoto (2019) dalam Amalia et al., (2022:75) kemiskinan adalah problematika kehidupan yang sudah mendunia, dalam artian isu kemiskinan telah menjadi perhatian dunia, dan isu tersebut ada pada semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangat berbeda-beda. Masyarakat miskin memiliki ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas produksi yang tidak memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari proses pembangunan yang sedang terjadi. Kondisi ini menggambarkan kemiskinan dengan gambaran situasi masyarakat yang tidak atau belum mampu untuk ikut serta dalam proses perubahan pembangunan ekonomi. Ketidakmampuan tersebut dapat diakibatkan oleh pengaruh dari luar (*external factors*) maupun pengaruh dari dalam (*internal factors*). Pengaruh dari luar dapat disebabkan oleh kondisi perekonomian suatu negara yang memburuk ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum tepat sasaran dalam menurunkan angka kemiskinan, sedangkan pengaruh dari

dalam dapat disebabkan karena menyerah dengan keadaan atau kurangnya usaha dalam meningkatkan kesejahteraan.

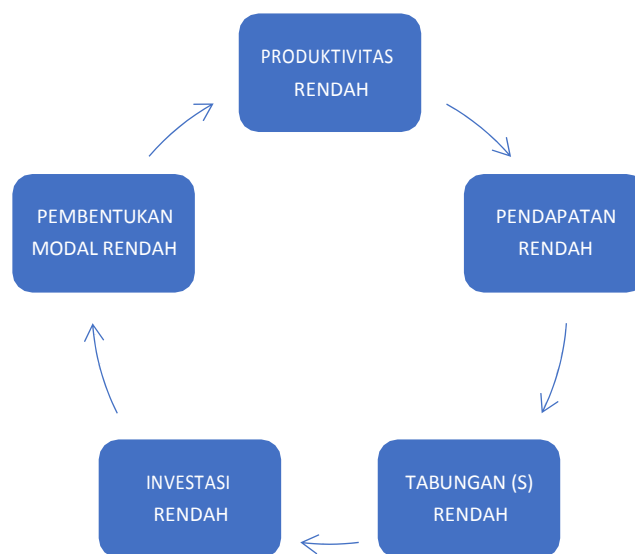
### **2.1.1.2 Teori Kemiskinan**

Ada banyak teori untuk memahami kemiskinan. Namun secara sederhana, setidaknya dalam konteks pembahasan ini terdapat konsep lingkaran setan kemiskinan yang pertama kali dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Amalia et al., (2022:225). Teori Ragnar Nurkse menjelaskan bahwa banyak sekali kegagalan dalam pembangunan yang terjadi diberbagai negara yang disebabkan karena masyarakat atau negara tersebut terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Lingkaran setan kemiskinan adalah sekumpulan kekuatan yang berinteraksi dan menciptakan situasi dimana suatu negara, terutama negara berkembang menghadapi banyak kesulitan untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Lingkaran setan kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, dipicu dengan rendahnya tingkat pendapatan, maka diakibatkan tingkat permintaan (konsumsi) menjadi rendah, sehingga pada akhirnya tingkat tabungan dan investasi juga rendah. Tingkat investasi yang rendah akan mengakibatkan kekurangan modal dan produktivitas yang rendah pula. Menurut Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang untuk menggapai pembangunan yang pesat, yaitu:

1. Dari Segi Penawaran/Supply (S)

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat akibat dari rendahnya produktivitas yang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan

masyarakat untuk menabung. Akibatnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan negara tersebut menghadapi kekurangan barang modal dan tingkat produktivitas akan tetap berada pada tingkat yang rendah.



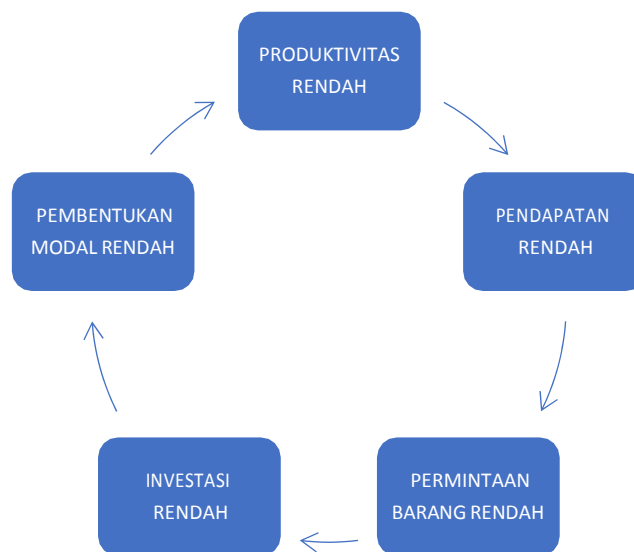
Sumber: Amalia et al., (2022)

### **Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan Dari Segi Supply**

#### 2. Dari Segi Permintaan/ Demand (D)

Penduduk negara miskin masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer atau habis untuk konsumsi saja dan negara berkembang masih tertinggal dengan berbagai aspek dari negara maju, hal ini karena kekurangan modal maupun teknologi yang digunakan masih minim. Sehingga produktivitas yang dihasilkan masih sangat rendah dan hal itu secara otomatis dapat mempengaruhi pendapatan seseorang akan rendah. Pendapatan yang rendah, maka akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya

serta tabungan yang dimilikipun akan rendah dan menyebabkan permintaan barang rendah pula. Permintaan barang yang rendah tidak akan meningkatkan investasi seseorang, sehingga pembentukan modal yang seharusnya dapat ditingkatkan akan ikut rendah pula.



Sumber: Amalia et al., (2022)

### **Gambar 2. 2 Lingkaran Setan Kemiskinan Dari Segi Demand**

Orang-orang di negara miskin memiliki tingkat tabungan yang sangat rendah karena mereka masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau dihabiskan untuk kebutuhan konsumsi. Akumulasi dari tingkat tabungan masyarakat yang rendah menyebabkan pendapatan juga rendah. Dari sudut pandang perusahaan, kekurangan modal menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat produktivitas atau rendahnya tingkat produksi menyebabkan pendapatan rendah, pendapatan yang dipakai untuk konsumsi tidak cukup untuk menabung dan

menyebabkan akumulasi tingkat tabungan menjadi rendah, salah satu pembentukan modal yang berasal dari tingkat tabungan. Jadi, apabila tingkat tabungan rendah maka pembentukan modal pun rendah. Nurkse berpendapat bahwa untuk melawan lingkaran setan kemiskinan dibutuhkan serangan gelombang investasi yang frontal diberbagai industri yang beraneka ragam (pertumbuhan berimbang). Yang memiliki makna, investasi modal secara berkala terhadap industri yang beraneka ragam dapat memperluas pasar hal tersebut merupakan tindakan fundamental untuk mengatasi lingkaran setan kemiskinan yang terjadi (Amalia et al., 2022:225).

### **2.1.1.3 Jenis-jenis Kemiskinan**

Menurut Listyaningsih (2018) kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, sebagai berikut:

#### **1. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan lebih rendah dari standar hidup yang layak, diukur dengan standar garis kemiskinan. Mereka dianggap tidak mampu memenuhi barang dan jasa yang diperlukan (seperti sandang, pangan, dan papan).

#### **2. Kemiskinan Relatif**

Merupakan kondisi yang disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Variasi pendapatan antar penduduk tersebut pada akhirnya digunakan untuk menentukan tingkat



kemiskinan sehingga bersifat tentatif dan tidak bisa diperbandingkan antar wilayah.

### 3. Kemiskinan Kultural

Yaitu kemiskinan yang berasal dari sikap individu atau masyarakat itu sendiri yang disebabkan karena faktor budaya, diantaranya seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar dan menyebabkan semakin parahnya tingkat kemiskinan atau dengan kata lain kemiskinan dapat disebabkan karena kemiskinan itu sendiri.

### 4. Kemiskinan Struktural

Yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Contoh kebijakan bantuan ekonomi kecil dan menengah dengan menerapkan berbagai persyaratan yang mustahil bisa dipenuhi oleh kelompok sasaran.

Selain empat kriteria di atas, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

#### 1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terkait dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana publik, serta keadaan tanah yang tandus. Keterisolasian daerah yang berdampak pada keterbatasan akses pengembangan ekonomi mengakibatkan penduduk terjebak dalam kemiskinan. Kemiskinan ini

banyak terjadi di wilayah-wilayah pedesaan dan tertinggal. Kemiskinan alamiah kebalikan dari kemiskinan buatan, yang berarti jebakan kemiskinan yang disebabkan karena keadaan dan kualitas penduduk itu sendiri. Anak-anak dari keluarga miskin akan lebih sulit keluar dari kemiskinan karena keterbatasan kemampuan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang dimiliki.

## 2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan lebih banyak disebabkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

### 2.1.1.4 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Mulyani (2017:114-115) terdapat beberapa faktor yang terjadi, diantaranya yaitu:

#### 1. Menurunnya perkembangan pendapatan per kapita global

Standar pendapatan per kapita bergerak seimbang dengan produktivitas. Jika produktivitas meningkat, pendapatan per kapita juga meningkat. Sebaliknya, jika produktivitas berangsur-angsur menurun, maka pendapatan per kapita juga akan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita, yaitu:

- a. Standar perkembangan suatu daerah meningkat;
- b. Politik ekonomi yang tidak sehat;

- c. Faktor luar negeri, antara lain: runtuhnya persyaratan perdagangan, beban utang, minimnya bantuan luar negeri, dan perang;
- d. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

Faktor ini memiliki dampak langsung pada kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja harus didukung oleh sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang dapat dijelaskan dengan sebaik-baiknya.

## 2. Tingginya biaya hidup

Tingginya lonjakan kebutuhan hidup adalah dampak dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Maka kemiskinan merupakan konsekuensi logis menurut realita di atas. hal ini ditimbulkan oleh kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik & banyaknya pengangguran.

## 3. Tidak merata dalam pembagian subsidi *income* pemerintah

Masalah ini selain menyulitkan dalam terpenuhinya kebutuhan dasar dan tanggungan keamanan untuk penduduk miskin, secara tidak langsung juga menghilangkan sumber pemasukan warga. Di pihak lain penduduk miskin masih terbebani oleh pajak negara.

Keberadaan kemiskinan juga merupakan masalah yang kompleks, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul dari pola kepemilikan sumber daya yang tidak setara, yang mengarah pada distribusi pendapatan yang tidak merata.
2. Kemiskinan yang berasal dari perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kualitas sumber daya manusia yang buruk yang artinya produktifitasnya juga rendah, dan pada akhirnya menyebabkan upah yang lebih rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin, serta faktor diskriminasi atau faktor genetik (turunan).

#### **2.1.1.5 Ukuran Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat beberapa indikator dalam mengukur kemiskinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada buku Pegangan Kemiskinan dan Ketimpangan yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai kurangnya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, diukur dari segi pengeluaran. Suatu penduduk dikatakan miskin jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan.

2. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah dari pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (baik makanan maupun bukan makanan) selama satu bulan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah kebutuhan konsumsi pangan minimal setara dengan 2.100 kkal per orang per hari. Paket produk sembako dasar diwakili oleh 52 jenis produk (sereal, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, lemak, dll.). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah jumlah minimum pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Satu paket produk kebutuhan pokok non-pangan diwakili oleh 51 produk berbeda di perkotaan dan 47 produk berbeda di pedesaan.

Rumus perhitungan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

### 3. Persentase Penduduk Miskin

*Head Count Index* (HCI – P0) adalah presentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Semakin rendah angka *Head Count Index*, maka semakin sedikit orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan sebaliknya, jika *Head Count Index* tinggi, berarti persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan juga tinggi.

Rumus perhitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

- $\alpha$  = 0
- $z$  = garis kemiskinan
- $y_i$  = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan  
( $i=1,2,3,3\dots,q$ )  $y_i < z$
- $q$  = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- $n$  = jumlah penduduk.

### 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan perbedaan antara pendapatan rata-rata penduduk miskin dan garis kemiskinan. Semakin rendah angka ini, semakin dekat pendapatan rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi angka ini, semakin besar perbedaan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin buruk.

Rumus perhitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha$  = 1

$z$  = garis kemiskinan

$y_i$  = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1,2,3,3,\dots,q$ )  $y_i < z$

$q$  = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = jumlah penduduk.

## 5. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Rumus perhitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha$  = 2

$z$  = garis kemiskinan

$y_i$  = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1,2,3,3,\dots,q$ )  $y_i < z$

$q$  = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = jumlah penduduk.

### 2.1.1.6 Indikator Kemiskinan

Menurut BPS (2014) dalam Mulyani (2017:113) terdapat kriteria rumah tangga dapat dikategorikan miskin apabila:



1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Dinding tempat tinggal berjenis bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/rembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/menggunakan fasilitas tersebut dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
10. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik.
11. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
13. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

### **2.1.1.7 Penanggulangan Kemiskinan**

Dalam penanggulangan kemiskinan, setidaknya pemerintah perlu memiliki dua strategi utama, yaitu: (1) Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan rentan melalui program sosial dan subsidi, (2) Melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas penduduk miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya, serta bantuan dari kebijakan program-program pemerintah seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kondisi kesehatan dan jenis pekerjaan. Ekonom James Heckman, pemenang Hadiah Nobel tahun 2000, menekankan pentingnya intervensi dalam pendidikan kelompok usia dini, yang memiliki manfaat lebih tinggi daripada intervensi pada usia dewasa. Untuk itu pemerintah membentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil/Stunting dan Perluasan Akses Pendidikan untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mencegah kemiskinan antar generasi. Dalam pelayanan kesehatan, pemerintah mempertahankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan salah satu program kesehatan berbasis asuransi sosial terbesar di dunia dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan, dan pembayaran JKN ditanggung oleh pemerintah.

Terkait strategi kedua, pemerintah harus mendorong peningkatan produktivitas kelompok miskin dan tertinggal, antara lain melalui penguatan UMKM. Karena banyak rumah tangga miskin dan rentan bekerja di sektor ini. Dengan cara meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM melalui

pelatihan, pendampingan, pengembangan kapasitas teknis dan kualitas produk, serta dukungan adopsi teknologi dan digitalisasi UMKM. Serta menyediakan balai Latihan kerja bagi masyarakat-masyarakat yang ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahliannya.

## **2.1.2 Pengangguran**

### **2.1.2.1 Definisi Pengangguran**

Secara umum, definisi pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin terlihat populasinya tidak dalam kondisi yang baik karena tidak semua angkatan kerja memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi juga menunjukkan bahwa penduduk hanya bertindak sebagai konsumen, tetapi tidak bertindak sebagai faktor produksi yang menghasilkan output. Menurunnya kesejahteraan masyarakat disebabkan karena mereka yang menganggur tentu akan meningkatkan peluang mereka untuk terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki penghasilan atau pendapatan. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang melebihi kapasitas perekonomian nasional. Dalam kondisi pertumbuhan kesempatan kerja yang rendah, maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja sangat berkaitan dengan rendahnya tingkat investasi, terutama di sektor industri dan jasa (Amalia et al., 2022:191). Kesimpulannya pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan,

mempersiapkan diri untuk berwirausaha, atau yang merasa tidak memperoleh pekerjaan, atau yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran adalah bagian angkatan kerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan. Di Indonesia setiap tahunnya mengalami penambahan angkatan kerja baru dan banyak dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan, bahkan secara kumulatif jumlah pengangguran semakin bertambah dari tahun ke tahun (Hasyim, 2017:13). Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka.

Menurut BPS (2022) Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang mengukur tenaga kerja yang menggambarkan pemanfaat yang kurang terhadap pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran dalam total angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi untuk sementara waktu tidak bekerja dan menganggur. Pengangguran adalah: (1) Penduduk aktif yang sedang mencari pekerjaan, (2) Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak dapat memperoleh pekerjaan, (4) Sekelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung, sebagai berikut:

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP = Jumlah pengangguran (orang)

PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)

Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan membagi jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dalam skala persentase. Kurangnya pendapatan yang diperoleh para pengangguran menyebabkan meminimalkan pengeluaran konsumsi mereka, yang menyebabkan penurunan tingkat kekayaan dan kesejahteraan mereka. Pengangguran jangka panjang juga dapat menimbulkan efek psikologis yang tidak baik bagi penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial karena dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dampak berkepanjangan dari banyaknya pengangguran adalah penurunan PDB negara dan pendapatan per kapita.

#### **2.1.2.2 Teori Pengangguran**

##### **1. Teori Lewis**

Lewis (1959) dalam Amalia et al., (2022:169) mengutarakan analisisnya yang kritis terhadap asumsi yang dibuat oleh para ekonom sebelumnya, di mana pandangan Neo-klasik tentang penawaran tenaga kerja masyarakat tidak bertambah. Namun, menurut pandangan teoretis John Maynard Keynes, tidak hanya persediaan tenaga kerja yang bertambah, tetapi juga tanah yang tersedia dan kapasitas produksi yang

jumlahnya tidak terbatas. Menurut Lewis, hal ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di negara-negara berkembang, karena negara-negara tersebut memiliki masalah tenaga kerja yang sangat tinggi atau berlebihan tanpa diimbangi dengan ketersediaan modal. Lewis menyatakan tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukan bagi negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap di banyak negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya, ternyata menghadapi masalah kekurangan modal dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas.

## 2. Teori Ranis dan Fei

Ranis dan Fei (1961) dalam Amalia et al., (2022:172) adalah ekonom yang dikenal dengan teori yang berjudul *A Theory of Economic Development* yang berarti bahwa negara terbelakang melewatkan proses transisi yang dapat dicapai untuk beralih dari keadaan stagnan ke pertumbuhan yang lebih baik. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori Lewis. Analisis teori ini bertujuan sebagai teori pembangunan bagi suatu negara yang menghadapi masalah *over* populasi, sehingga negara tersebut memiliki masalah pengangguran yang serius dan ketersediaan sumber daya alam yang dapat dieksploitasi sangat terbatas.

### 2.1.2.3 Jenis Pengangguran

Banyak ungkapan untuk jenis pengangguran yang ditemukan dalam literatur yang berbeda. Untuk membedakan jenis-jenis pengangguran, ada dua cara

pengklasifikasiannya, yaitu menurut sumber atau penyebabnya dan menurut ciri-ciri pengangguran (Hasyim, 2017:199-203):

1. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

a. Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran ini terjadi karena seseorang yang berhenti bekerja ingin mendapatkan pekerjaan lain yang dirasa lebih baik dan menguntungkan dari sebelumnya. Contohnya, seorang guru honorer yang memutuskan untuk berhenti dan pindah ke lembaga pendidikan lain agar mendapatkan gaji yang lebih baik.

b. Pengangguran Siklikal

Pengangguran ini terjadi ketika faktor ekonomi yang naik dan turun disuatu negara. Saat ekonomi negara sedang turun, maka lowongan pekerjaan akan semakin sedikit dan sebaliknya. Contohnya, adalah seorang karyawan yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami penurunan permintaan.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi akibat suatu negara mengalami perubahan ekonomi. Misalnya ketika suatu negara agraris berubah menjadi negara industri yang mengharuskan seseorang untuk dapat menguasai teknologi baru. Contohnya, seorang pekerja di perkebunan sawit yang menganggur karena tempatnya bekerja dialihfungsikan menjadi pabrik.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini terjadi karena perkembangan teknologi yang menggantikan tenaga kerja di suatu bidang. Contohnya, seorang pegawai bagian las mobil menganggur setelah tempatnya bekerja kini menggunakan robot untuk mengelas mobil.

2. Berdasarkan ciri-ciri pengangguran, dapat dibagi menjadi empat golongan yaitu (Hasyim, 2017:203):

a. Pengangguran Terbuka

Peningkatan jumlah angkatan kerja lebih cepat daripada pertambahan lowongan pekerjaan menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja yang menganggur. Hal ini berdampak pada jangka panjang, karena banyak dari angkatan kerja menjadi tidak memperoleh pekerjaan atau tidak adanya pekerjaan yang tersedia bagi mereka sehingga mereka tidak memiliki pendapatan. Keadaan ini disebut pengangguran terbuka (*open unemployment*). Oleh karena itu, mereka sepenuh waktu benar-benar menganggur. Pengangguran terbuka juga dapat terjadi akibat dari kegiatan ekonomi yang lesu yang mengakibatkan penurunan produksi di berbagai sektor akibat penurunan angkatan kerja.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal pada suatu perusahaan. Kondisi ini disebabkan karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan



kemampuannya sehingga dampak ketidakcocokan akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Pengangguran jenis ini juga dapat terjadi karena terlalu banyak tenaga kerja yang digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan melebihi batas optimal.

c. Pengangguran Musiman

Pengangguran yang terjadi karena adanya permintaan pekerjaan pada satu waktu atau musim tertentu. Pengangguran jenis ini biasanya terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Misalnya pada sektor perikanan, ketika sedang musim angin kencang (angin barat) atau waktu terang bulan para nelayan tidak dapat melaut mencari ikan. Jika contoh kasus pada petani, ketika kondisi sedang musim kemarau petani tidak bisa menggarap lahan sawahnya karena *supply* air yang tidak ada. Tetapi di sisi lain, di sela-sela waktu setelah tanam dan panen para petani sawah atau petani lahan kering masih memiliki waktu luang. Apabila kondisi di atas para nelayan dan petani sawah tidak melakukan pekerjaan lain, mereka terpaksa menganggur. Pengangguran semacam ini digolongkan sebagai pengangguran musiman (*seasonal unemployment*).

d. Setengah Menganggur

Di negara berkembang, populasi bermigrasi dengan sangat cepat dari desa ke kota. Oleh karena itu, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Beberapa

terpaksa menganggur sepenuh waktu. Selain itu, ada juga orang yang tidak menganggur tetapi tidak bekerja penuh waktu dan jam kerjanya jauh lebih rendah dari biasanya. mereka mungkin hanya bekerja satu sampai dua hari dalam seminggu, atau satu sampai empat jam sehari. Pekerja yang bekerja dengan jam kerja seperti yang dijelaskan diklasifikasikan sebagai setengah menganggur atau *underemployed*. Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

#### **2.1.2.4 Penyebab Pengangguran**

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang bekerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi ketika jumlah angkatan kerja melebihi kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.
2. Tidak seimbangnya struktur lapangan kerja.
3. Tidak seimbangnya antara kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dengan penyediaan tenaga terdidik. Jika jumlah kesempatan kerja sama dengan atau lebih besar dari angkata kerja, maka belum tentu ada pengangguran. Alasannya adalah belum tentu ada kecocokan antara pendidikan yang dibutuhkan dengan apa yang tersedia. Ketidakseimbangan ini berarti sebagian tenaga kerja saat ini tidak dapat mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia.

4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
5. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja di suatu daerah tidak seimbang. Kemungkinan jumlah angkatan kerja di suatu daerah tersebut lebih besar dari kesempatan kerja yang tersedia, sedangkan sebaliknya di daerah lainnya. Kondisi ini akan mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lainnya, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

#### **2.1.2.5 Dampak Pengangguran**

Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian dikelompokkan menjadi dua aspek ekonomi, yaitu:

1. Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian Suatu Negara

Pada dasarnya tujuan akhir dari pembangunan ekonomi suatu negara adalah untuk meningkatkan kemakmuran manusia dan pertumbuhan ekonomi, agar stabil dan terus menerus membaik. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi di suatu negara tersebut menyebabkan sulitnya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang diinginkan. Hal ini karena pengangguran berpengaruh negatif terhadap kegiatan ekonomi, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Pengangguran dapat mengakibatkan orang tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang telah diraihinya. Hal ini karena pengangguran dapat mengakibatkan pendapatan nasional riil (aktual) yang dihasilkan oleh masyarakat menjadi lebih kecil

dari pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya), sehingga kesejahteraan yang diraih oleh masyarakat juga lebih sedikit.

- b. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan nasional dari sektor pajak. Karena pengangguran yang tinggi dapat melemahkan kegiatan ekonomi, sehingga pendapatan masyarakat juga menurun. Akibatnya pajak yang harus dibayar oleh masyarakat berkurang, dan juga dana untuk kegiatan ekonomi negara berkurang, sehingga kegiatan pembangunan semakin berkurang.
  - c. Pengangguran tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan melemahkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan barang manufaktur atau barang hasil produksi turun. Kondisi demikian tidak mendorong investor (pengusaha) untuk memperluas atau menciptakan industri baru. Oleh karena itu, tingkat investasi turun sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terealisasi.
2. Dampak Pengangguran Terhadap Individu dan Masyarakat
- a) Pengangguran akan menghilangkan mata pencarian;
  - b) Pengangguran akan menghilangkan keterampilan;
  - c) Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial politik.

### **2.1.2.6 Cara Mengatasi Pengangguran**

Beberapa cara untuk mengatasi pengangguran, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Memperluas Lapangan Kerja**

Mengingat kebutuhan dunia usaha dan revolusi industri berjalan beriringan dan berkembang pesat, sudah selayaknya dilakukan peningkatan dan pemerataan lowongan kerja di berbagai bidang. Peningkatan lapangan kerja ini harus dilakukan untuk mencegah peningkatan migrasi desa ke kota yang dapat meningkatkan persaingan, mempengaruhi demografi penduduk, dan mempengaruhi kesempatan kerja yang tidak merata.

#### **2. Mendorong Investasi**

Pemerintah harus terus mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kesempatan kerja di Indonesia.

#### **3. Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Bidang pendidikan merupakan sarana terpenting untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas sehingga dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan sektor tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus menyesuaikan kurikulum dan memberikan kegiatan kreatif dengan tren pekerjaan saat ini untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia profesional.

#### 4. Medirikan Pusat-Pusat Latihan Kerja

Pusat pelatihan harus dibentuk untuk memberikan pelatihan bagi pekerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Maka, SDM yang akan bekerja memiliki pengalaman dan sertifikasi bahwa mereka dapat bekerja di bidang tertentu.

#### 5. Mengadakan Kegiatan Ekonomi Informal

Salah satunya dengan mengembangkan industri rumahan di banyak tempat yang menyerap tenaga kerja. Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk pengembangan sektor informal.

#### 6. Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja

Pengangguran terbuka adalah orang yang masih mempunyai keinginan untuk bekerja dan selalu berusaha mencari peluang. Dalam hal ini, akan lebih baik jika calon pekerja yang menganggur menerima nasihat atau dukungan pelatihan berdasarkan minat pribadi dan kebutuhan industri mereka.

#### 7. Menyelenggarakan Bursa Pasar Kerja

Bursa tenaga kerja adalah pemberitahuan informasi tentang pekerjaan kepada masyarakat umum. Informasi ini disebarluaskan langsung oleh perusahaan dan lembaga yang membutuhkan karyawan. Tujuan diadakannya bursa kerja adalah untuk menjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pencari kerja secara langsung di tempat. Banyak informasi tentang lowongan yang belum dikomunikasikan

kepada publik, sehingga biasanya hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu.

#### 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah harus terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh dan merata, peluang untuk menciptakan lapangan kerja juga meningkat.

#### 9. Meningkatkan Transmigrasi

Migrasi merupakan strategi pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Pendatang dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang ada.

#### 10. Melakukan Deregulasi dan Debirokrasi

Deregulasi dan debirokrasi di beberapa sektor industri dilaksanakan untuk mendorong investasi baru. Deregulasi mengubah aturan main di beberapa sektor, deregulasi biasanya mengarah pada penyederhanaan peraturan. Pada saat yang sama, debirokrasi adalah perubahan struktur aparat pemerintah yang mengelola sektor-sektor tertentu. Debirokrasi biasanya menghasilkan penyederhanaan jumlah pegawai/instansi pemerintah yang menangani masalah tertentu.

### **2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

#### **2.1.3.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) atau Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990 dan dipublikasikan berkala dalam laporan tahunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari tiga dimensi dasar yaitu, umur panjang, pengetahuan dan taraf hidup yang layak. IPM cocok untuk melihat dampak kinerja pembangunan daerah, karena itu menunjukkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan taraf hidup yang layak. Saat merencanakan pembangunan, IPM juga berfungsi untuk memberikan panduan prioritas dalam memformulasikan dan menetapkan kebijakan dan program.

IPM merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia, baik dampaknya terhadap kondisi manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun non fisik (intelektualitas). Perkembangan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang terdapat pada angka harapan hidup dan daya beli seseorang, sedangkan kondisi non fisik tercermin pada kualitas pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, daerah dengan tingkat IPM yang tinggi diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya

#### **2.1.3.2 Teori Indeks Pembangunan Manusia**

Teori Rostow dan Musgrave dalam Anantika & Sasana (2020) adalah pandangan yang muncul dari pengamatan yang dilakukan oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan pada teori tertentu. Pandangan ini menjelaskan bahwa



pendidikan yang baik dan kesehatan yang baik dapat meningkatkan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan memainkan peran besar dalam menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai manfaat instrumental. Salah satu faktor yang diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu belanja modal. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah dipengaruhi oleh kebijakan internal pemerintah terhadap aspek pembangunan manusia.

Sejalan juga dengan teori sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Schultz (1961) dalam Subroto (2014) bahwa secara umum faktor terpenting yang mendukung proses pembangunan adalah tingkat pendidikan masyarakat. Proses ini didasarkan pada keyakinan bahwa cara paling efektif untuk mencapai pembangunan nasional suatu negara adalah dengan meningkatkan keterampilan masyarakat dan pendidikan yang menjadi bagiannya. Para ekonom mengembangkan teori pembangunan berdasarkan kapasitas produksi tenaga kerja manusia dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal sebagai investasi modal manusia (*investment in human capital*). Teori ini berpendapat bahwa pendidikan formal adalah salah satu alat yang paling penting untuk menciptakan masyarakat yang sangat produktif. karena semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula produktivitas masyarakat tersebut. Konsep ini pada dasarnya menganggap bahwa manusia adalah suatu bentuk modal, seperti halnya bentuk modal lainnya seperti mesin, teknologi, tanah, uang, dan material. Manusia sebagai modal manusia tercermin dalam bentuk pengetahuan, ide, kreativitas, keterampilan dan produktivitas kerja. Berbeda dengan bentuk modal lain yang

diperlakukan hanya sebagai alat saja, tetapi modal manusia ini dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi, seperti pendidikan formal/informal, pengalaman kerja, kesehatan atau gizi, atau bahkan migrasi.

### **2.1.3.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

IPM mempunyai tiga dimensi yang digunakan dalam dasar perhitungannya: (1) Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, (2) Pengetahuan yang dihitung dari angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah, dan (3) Standar hidup layak yang dihitung dari PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.

#### **1. Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup menggambarkan usia maksimum yang dapat diharapkan seseorang untuk bertahan hidup. Angka harapan hidup merupakan indikator penting untuk mengukur *longevity* (panjang umur). Secara teori, seseorang dapat hidup lebih lama jika sehat, dan jika sakit mereka harus membantu mempercepat pemulihannya sehingga dapat bertahan hidup lebih lama. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat dikatakan gagal jika penggunaan sumber daya masyarakat tidak berorientasi pada pembinaan kesehatan untuk mencegah “warga meninggal lebih awal dari yang seharusnya”. Indikator Angka harapan hidup ini meliputi, diantaranya:

- Angka kematian bayi.
- Penduduk yang usianya diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun.

- Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan.
- Persentase penduduk sakit “morbiditas”.
- Rata-rata lama sakit.
- Persentase penduduk yang melakukan pengobatan mandiri.
- Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis
- Persentase balita kekurangan gizi.
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum bersih.
- Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah.
- Persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan.
- Persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi.

## 2. Pengetahuan atau Pendidikan

Dalam hubungannya dengan IPM, terdapat dua jenis indikator pendidikan, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator pendidikan ini bertujuan untuk mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Dibawah ini merupakan terdapat indikator pendidikan yang meliputi:

- Angka melek huruf.
- Rata-rata lama sekolah.
- Angka partisipasi sekolah.
- Angka putus sekolah “*Drop Out/DO*” dan lain-lain.

### 3. Standar Hidup Layak

Indikator standar hidup layak dapat dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi:

- Jumlah yang bekerja.
- Jumlah pengangguran terbuka.
- Jumlah dan persentase penduduk miskin.
- PDRB riil per kapita.

Daya beli penduduk merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian masyarakat pada saat mengukur indeks pembangunan manusia. Daya beli ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membiayai kebutuhan konsumsinya dan sangat berbeda dengan produk nasional bruto per kapita atau biasa disebut pendapatan per kapita. Data PDB per kapita tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak karena tidak sesuai untuk mengukur daya beli penduduk. Oleh karena itu, daya beli penduduk dihitung dengan menggunakan konsumsi yang disesuaikan per penduduk. Setelah dilakukan perhitungan pengeluaran per kapita tahunan yang disesuaikan. Adapun rumus umum yang sering digunakan, diantaranya sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$$

Dimana:

$X_1$  = Indeks Pendidikan

$X_2$  = Indeks Harapan Hidup

$X_3$  = Indeks Daya Beli

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat dengan mengelompokkan IPM ke dalam beberapa kriteria, yaitu:

$IPM < 60$  = IPM rendah

$60 < IPM < 70$  = IPM sedang

$70 < IPM < 80$  = IPM sangat tinggi

$IPM > 80$  = IPM sangat tinggi

Dari kriteria di atas memiliki makna jika semakin tinggi skor IPM suatu wilayah, maka semakin besar pula kesejahteraan sosial wilayah tersebut yang dapat diukur dari komponen dimensi daya beli (pendapatan), pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, jika semakin rendah skor IPM suatu wilayah, maka semakin rendah kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus terus dilakukan perbaikan dan peningkatan sebagai bagian dari pembangunan daerah.

### **2.1.3.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut (Anggraini, 2018):

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. IPM dapat menentukan tingkat suatu daerah/negara atau tingkat pembangunan.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan informasi strategis. Dikarenakan IPM bukan hanya sebagai ukuran kinerja pemerintah tetapi juga digunakan sebagai alat alokasi untuk menentukan dana alokasi umum (DAU).

### **2.1.4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

#### **2.1.4.1 Definisi Investasi/ Penanaman Modal**

Investasi yang dikenal juga sebagai penanaman modal memiliki arti yang sama, istilah investasi biasanya populer dikalangan dunia usaha dan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *investment*. Sedangkan istilah penanaman modal banyak digunakan dalam perundang-undangan. Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang berasal dari perseorangan atau perusahaan maupun badan hukum dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik berbentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha dengan harapan mendapatkan hasil keuntungan pada waktu tertentu (Harjono, 2007:19).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala jenis kegiatan penanaman modal, baik melalui penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik itu investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang bisnis yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk mendapatkan *profit* (keuntungan). Dalam Undang-Undang ini pun terdapat tujuan penyelenggaraan penanaman modal, diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja baru;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, diantaranya adalah:

1. Adanya alasan untuk menambah atau setidaknya mempertahankan modal.

2. Penanaman modal terbagi menjadi dua jenis yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing diperoleh dari pembiayaan luar negeri, sedangkan penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal dari pembiayaan dalam negeri.

Setiap investasi harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, dengan adanya investasi yang ditanamkan, investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan memperoleh pendapatan, maka mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

#### **2.1.4.2 Teori Investasi**

Peningkatan investasi ditujukan untuk mendorong pembangunan ekonomi negara. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai bagian dari pendapatan nasional, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Investasi berhubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, ketika investasi meningkat maka PDB juga akan meningkat dan sebaliknya, ketika investasi menurun maka PDB akan menurun. Dalam konteks yang sama, teori Harrod-Domar dalam Sugiarto (2019) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan pembentukan modal sebagai modal tambahan. Pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi barang, serta pengeluaran yang meningkatkan permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan. Hal ini membutuhkan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan



berkelanjutan biasanya ditopang oleh peningkatan ekspor dan investasi. Selain itu, Harrod-Domar menggarisbawahi pentingnya setiap perekonomian menyisihkan sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang modal yang rusak seperti gedung, peralatan, material untuk menumbuhkan perekonomian dan membutuhkan investasi baru sebagai penanaman modal.

Teori ini menekankan bahwa investasi memiliki posisi yang sangat strategis pada tingkat pembangunan ekonomi negara. Selain itu, ditemukan adanya prasyarat tertentu untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan tidak menghambat pembangunan. Dengan menggunakan studi kasus ekonomi negara maju, teori Harrod-Domard menyimpulkan bahwa investasi memiliki efek ganda dalam jangka panjang (*long term*). Di satu sisi, investasi mempengaruhi perkembangan produksi nasional negara karena adanya persediaan modal yang merupakan faktor penting bagi kelangsungan kehidupan ekonomi. Di sisi lain, investasi mempengaruhi permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil diperlukan kondisi dimana pelaku ekonomi memiliki ekspektasi dan pandangan yang stabil. Investasi juga merupakan sarana dan pendorong untuk mencapai pembangunan ekonomi, terutama ketika berusaha memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi modal sebagai prasyarat mutlak untuk pembangunan ekonomi.

Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa investasi dapat meningkatkan pendapatan. Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang

mendorong investasi akan semakin diperkuat untuk mengatasi masalah stagnasi atau kelambanan ekonomi dan lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, sehingga tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan meningkat dan merata.

Secara teoritis, peran dan fungsi investasi dalam sistem ekonomi dapat digambarkan dengan satu rumus, yaitu:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Dimana:

Y = Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Dari persamaan di atas, dapat diketahui bahwa investasi merupakan salah satu alat terpenting untuk meningkatkan perekonomian. Dengan meningkatnya investasi, total pengeluaran nasional juga meningkat, atau dapat dikatakan bahwa daya beli dan daya saing nasional juga akan mengalami peningkatan. Faktor investasi dengan faktor pengeluaran pemerintah dan faktor ekspor berfungsi sebagai faktor tambahan yang memperkuat sistem perekonomian. Hakikatnya, kegiatan investasi berkaitan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor, serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Pengaruh dari ganda investasi (*multiplier effect*) sebelum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemungkinan akan mempengaruhi faktor ekonomi lainnya.

Oleh karena itu, investasi secara langsung dan sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang rasional bersaing dalam memajukan kebijakan yang ramah dalam dunia usaha untuk menarik modal. Kegagalan kebijakan ini memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial (kesejahteraan masyarakat) yang penting.

#### **2.1.4.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris yaitu *domestic investment*. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat di lihat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pelaksanaan penanaman modal didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak-pihak yang dapat menjadi penanaman modal dalam negeri adalah:

1. Orang atau perorangan warga Negara Indonesia;
2. Badan Usaha Indonesia;
3. Badan Hukum Indonesia.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan terkait Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu:

1. Perseroan Terbatas (PT);
2. *Commanditaire Vennootschap* (CV);
3. Firma (Fa);
4. Badan Usaha Koperasi;
5. BUMN;
6. BUMD;
7. Perorangan.

Pengertian modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan rakyat Indonesia, termasuk hak dan milik, baik milik negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berkedudukan di Indonesia, yang digunakan dalam menjalankan usaha selama modal tersebut tidak diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 2 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk, sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri secara langsung (*Domestic Direct Investment, DDI*), yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri secara tidak langsung (*Domestic Indirect Investment, DII*) yaitu melalui pembelian obligasi, surat kertas perbendaharaan negara, penerbitan lain (saham) yang di terbitkan oleh

perusahaan serta deposito dan tabungan dengan masa berlaku minimal satu tahun.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Pasal 3 Ayat 1 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Untuk mengetahui dan membedakan apakah suatu perusahaan merupakan perusahaan asing atau perusahaan nasional, hal tersebut dapat dilihat dari kepemilikannya. Perusahaan nasional merupakan perusahaan yang jika sekurang-kurangnya 51% modalnya berasal dari dalam negeri yang ditanamkan di dalamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional. Dan jika dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), setidaknya 51% dari seluruh saham harus terdaftar sebagai saham. Karena peraturan yang berlaku, persentase ini harus selalu dinaikkan, sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi 74%, untuk usaha yang tidak memenuhi syarat merupakan termasuk perusahaan asing. Berdasarkan pengertian di atas, pengertian penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada hakikatnya sama, yaitu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

#### **2.1.4.4 Fasilitas Penanaman Modal**

Penyediaan fasilitas penanaman modal diakui sebagai upaya penyerapan lapangan kerja, menggabungkan pembangunan ekonomi dengan perlakuan ekonomi berbasis masyarakat, orientasi ekspor dan lebih banyak insentif yang menguntungkan untuk penanaman modal yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait penanaman modal di daerah tertinggal dan daerah dengan infrastruktur terbatas. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari pemberian fasilitas yang bersifat insentif ini adalah:

1. Mempercepat penyebaran investasi ke seluruh pelosok negeri, karena investasi membawa pertumbuhan ekonomi. Sehingga, kesejahteraan dapat meningkat melalui pertumbuhan ekonomi.
2. Insentif atau fasilitas yang diberikan untuk meningkatkan sektor ekonomi. Perekonomian pasti akan tumbuh jika sektor-sektor tersebut berkinerja dengan baik. Termasuk sektor produksi yaitu industri. Artinya harus ada sektor yang didorong untuk mencapai tujuan penanaman modal, pemerintah memberikan fasilitas bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Fasilitas tersebut diberikan kepada:
  - a. Investor yang memperluas usahanya; dan
  - b. Investor melakukan penanaman modal baru.

Untuk penanam modal baru akan menerima fasilitas penanaman modal jika setidaknya memenuhi salah satu kriteria yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat 3 UU No. 25 tentang penanaman modal, yaitu:

1. Menyerap banyak tenaga kerja;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Termasuk pembangunan infrastruktur;
4. Melakukan inovasi teknologi;
5. Penciptaan industri perintis/pionir;
6. Terletak di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;

7. Menjaga kelestarian lingkungan;
8. Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
9. Kerja sama dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi;
10. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri.

Fasilitas yang diberikan dalam penanaman modal menurut Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, salah satunya adalah fasilitas perpajakan dan pembayaran lainnya, fasilitas perpajakan untuk investor yang memperluas usahanya dan untuk investor yang melakukan penanaman modal baru serta yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berupa:

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu atas jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam suatu periode tertentu;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk dalam hal mengimpor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri;
3. Pembebasan atau penangguhan bea masuk atas bahan baku atau bahan penolong yang digunakan untuk keperluan produksi selama jangka waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu;
4. Pembebasan dan/atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin yang digunakan untuk keperluan

produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;

5. Depresiasi atau amortisasi yang dipercepat;
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, terutama di bidang usaha tertentu, pada area atau daerah tertentu.

#### **2.1.4.5 Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri**

Adapun tujuan adanya Penanaman Modal Dalam Negeri di suatu negara yaitu:

1. Mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak daerah dan lain-lain;
2. Menciptakan hambatan perdagangan bagi perusahaan lain;
3. Mencapai keuntungan yang lebih tinggi melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sistem perpajakan yang lebih baik dan infrastruktur yang lebih baik;
4. Menarik aliran modal yang signifikan ke dalam negeri.

Sedangkan manfaat dari Penanaman Modal Dalam Negeri, yaitu sebagai berikut:

1. Dapat menghemat devisa;
2. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri;
3. Mendorong pengembangan industri dalam negeri;
4. Berkontribusi dalam upaya penciptaan lapangan kerja.



Saat ini, banyak negara menerapkan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan investasi baik dari dalam negeri maupun modal asing. Hal ini dilakukan pemerintah karena kegiatan investasi dapat mempercepat kegiatan perekonomian negara, menyerap tenaga kerja, meningkatkan produksi, menghemat devisa negara dan bahkan dapat meningkatkan devisa (Anggraini, 2018:8).

#### **2.1.4.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal**

1. Tingkat keuntungan yang diperkirakan

Prakiraan keuntungan di masa depan memberikan gambaran kepada pengusaha tentang jenis usaha yang mungkin dan layak di masa depan, serta jumlah investasi yang harus dilakukan untuk menutup aset modal tambahan yang diperlukan.

2. Tingkat bunga (*interest rate*)

Tingkat bunga menentukan jenis investasi apa yang menguntungkan pengusaha, dan investor hanya menginvestasikan modalnya jika pengembalian modal yang diinvestasikan sebagai persentase dari laba bersih (belum dikurangi dengan tingkat yang dibayar).

3. Perkiraan mengenai ekonomi di masa depan

Ramalan kondisi mengenai ekonomi di masa depan dapat digunakan untuk menentukan jumlah investasi yang akan dihasilkan dalam perekonomian. Jika perkiraan masa depan baik, investasi akan meningkat. Sebaliknya, jika ramalan situasi ekonomi ke depan buruk, maka tingkat investasi akan rendah.

#### 4. Kemajuan teknologi

Dengan penemuan-penemuan teknologi (inovasi), para pengusaha semakin banyak menerapkan langkah-langkah reformasi untuk mencapai investasi yang maksimal

#### 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya

Ketika pendapatan nasional meningkat, maka pendapatan masyarakat meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total *agregat demand* pada akhirnya mendorong pertumbuhan investasi lainnya (*induced investment*).

#### 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan

Semakin tinggi laba perusahaan, semakin mendorong pengusaha menggunakan sebagian laba yang dihasilkan untuk investasi baru.

#### 7. Situasi politik

Stabilitas politik negara menjadi pertimbangan investasi tersendiri bagi investor, terutama investor asing. mengingat investasi membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengembalikan modal yang diinvestasikan dan menghasilkan pendapatan. Jadi investor mengharapkan stabilitas politik jangka panjang

#### 8. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah

Pengeluaran negara dapat berupa pengeluaran pembangunan, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana atau fasilitas publik dalam mendukung kegiatan investasi dan perekonomian secara keseluruhan, baik skala nasional maupun regional. Sehingga dapat menarik investor

dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di negara atau daerah tersebut.

9. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah setempat

Tersedianya kemudahan dalam birokrasi, dalam perpajakan (*tax holiday*), yaitu jika suatu perusahaan ingin menginvestasikan keuntungan yang dihasilkannya dalam investasi baru, atau jika perusahaan tersebut siap dan bersedia untuk berinvestasi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu sehingga mendorong para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut.

10. Pengaruh nilai tukar (kurs)

Secara teori, pengaruh perubahan nilai tukar terhadap investasi bersifat tidak pasti (*uncertainty*). Terdapat dua saluran yang dapat mempengaruhi perubahan nilai tukar, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Dalam jangka pendek, depresiasi nilai tukar dapat mengurangi investasi melalui efek negatifnya terhadap penyerapan domestik atau yang dikenal *expenditure reducing effect*. Karena penurunan nilai tukar dapat menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang kenaikan tingkat harga umum dan selanjutnya dapat melemahkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada level perusahaan direspons dengan pengurangan pengeluaran/modal investasi. Di sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran (*expenditure switching*) terhadap perubahan nilai tukar pada investasi relatif tidak pasti. Penurunan nilai tukar domestik dapat meningkatkan produk

impor yang diukur dalam mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang yang diperdagangkan/diekspor (*traded goods*) relatif terhadap barang yang tidak diperdagangkan (*non traded goods*), sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang yang diperdagangkan.

#### **2.1.4. Pentingnya Investasi**

Pemerintah sangat memahami peran investasi dan pentingnya dukungan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selanjutnya dengan melalui beberapa proyek infrastruktur ekonomi, tetapi juga pada infrastruktur sektor sosial dan kehidupan masyarakat. Partisipasi dan dukungan nyata juga diperlukan di semua tingkat pemerintah pusat dan daerah dan di semua tingkat masyarakat perkotaan dan pedesaan. Upaya peningkatan investasi dengan menciptakan lingkungan investasi dan bisnis yang kompetitif akan dilanjutkan dengan pengelolaan kebijakan makro yang rasional serta stabilitas politik dan keamanan yang senantiasa terjaga. Dua pilar kebijakan juga bertujuan untuk mendorong investasi, yaitu:

1. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha untuk membuat proses perizinan usaha yang lebih efisien.
2. Meningkatkan investasi inklusif terutama dari investor dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi saat ini mempengaruhi kehidupan penduduk negara. Semua ini memengaruhi kesejahteraan manusia. Penguatan peran dan kelembagaan negara sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan

investasi. Daya tarik investasi dapat dicapai dengan beberapa cara, antara lain dengan meningkatkan pelayanan perizinan, meningkatkan kepastian hukum, meningkatkan diversifikasi pasar dan mempromosikan barang-barang lokal yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Investasi didorong dengan meningkatkan akses UKM pada sumber daya produktivitas. Tanpa kelembagaan dan kapasitas yang siap, kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Pemerintah harus menata kembali fungsi organisasi dan manajemen yang ada (Anggraini, 2018:20).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan sesuatu riset dan referensi agar peneliti dapat menemukan inspirasi baru untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung, Beberapa di antaranya tercantum dalam tabel.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian/Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Yulia Adella Sari.(2021). “Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”.	- Tingkat Pengangguran Terbuka	- Jumlah Penduduk - Tingkat Kemiskinan	Secara bersama-sama seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Secara Parsial upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan, TPT dan Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.	Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 10(2), 121-130. ISSN: 2684-9313.
2.	Aditya Eka Mahardika M.S & Hendra Kusuma.(2022). “Analisis Determinan Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 -2020”.	- Jumlah Penduduk Miskin - Indeks Pembangunan Manusia - Tingkat Pengangguran Terbuka	- Laju Pertumbuhan Ekonomi	Semua variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Jawa Tengah.	Jurnal Ilmu Ekonomi, 6(2), 268-283. ISSN: 2716-4799 .
3.	Vyra Luthfia Annisa & Nasruddin.(2022). “Pengaruh Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan”.	- Tingkat Pengangguran - Indeks Pembangunan Manusia	- Investasi - Tingkat Kemiskinan	Secara bersama-sama seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan. Sedangkan secara parsial tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan, jika variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan.	Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan, 5(1), 203-216. ISSN 2746-3249.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Putri Indah Sari, Sri Muljaningsih, dan Kiky Asmara.(2021). “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik”.	- IPM - Tingkat Pengangguran Terbuka - Jumlah Penduduk Miskin	- PDRB	PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Tetapi Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.	Transformasi Sintaks Jurnal, 2(05). E-ISSN: 2721-2769.
5.	Zikri Azriyansyah. (2022). “Analisis Pengaruh IPM, PDRB dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021”.	- IPM - Tingkat Pengangguran	- PDRB - Tingkat Kemiskinan	Secara parsial, IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sementara PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara bersama-sama, semua variabel berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.	EBISMEN : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 1(3), 225-238. E-ISSN 2962-7621.
6.	Elvira Rosa laoh, Josep Bintang Kalangi, Hanly F.Dj. Siwu.(2023). “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow”.	- IPM - Jumlah Penduduk Miskin	- PDRB	Secara parsial PDRB berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 23(1), 83-96.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Elana Cintiya Erdiyanti & Syamsul Huda.(2022). “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Jumlah Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin Di Jawa Tengah”.	- IPM - Jumlah Penduduk Miskin	- Jumlah Pengangguran Terbuka - PDRB	Secara bersama-sama seluruh variabel bebas berpengaruh dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Secara parsial IPM dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan jumlah pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.	Jurnal Randai, 3(1). ISSN: 2723-4657.
8.	Indah Purboningtyas, Indah Retno Sari, Tian Guretno, Ari Dirgantara, Dwi Agustina, M Al Haris.(2020). “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”.	- Jumlah Penduduk Miskin - TPT - IPM		Secara parsial tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan, IPM berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Secara bersama-sama semua variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.	Jurnal Saintika Unpam, 3(1), 81-88. ISSN: 2655-7312.
9.	Suryanto Wiganepdo S & Herman Soegoto.(2022). “Peran PMDN dan PMA Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Di Indonesia”.	- PMDN - Jumlah Penduduk Miskin	- PMA	Secara bersama-sama semua variabel berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia, sedangkan secara parsial PMDN dan PMA berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.	Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, 12(1),1-15. ISSN: 2086-0455
10.	Andri Adi Pratama et al., (2022). “Pengaruh Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	- PMDN	- Tingkat Kemiskinan	Secara bersama-sama semua variabel X berpengaruh signifikan. Secara parsial, PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2011-2021.	EBISMEN : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 1(2),179-188. ISSN: 2962-7621.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2011-2021”				
11.	Hanifah Safitri & Muhammad Saleh.(2020). “Pengaruh Belanja Modal, Belaja Non Modal, Penanaman Modal Asing, Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Kemiskinan Kalimantan Selatan”.	- PMDN - Kemiskinan	- Belanja Modal - Belanja Modal Non Modal - PMA - Tingkat Kemiskinan	Secara parsial belanja modal dan PMA berpengaruh negatif dan signifikan, belanja non modal berpengaruh positif dan tidak signifikan, sementara PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara bersama-sama semua variabel memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Ekonomi Pembangunan. 3(1), 229-242.
12.	Putri Indah Sari, Sri Muljaningsih, Kiky Asmara.(2021). “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Gresik”.	- IPM - TPT - Jumlah Penduduk Miskin	- PDRB	Secara parsial PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sementara TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.. Secara bersama-sama semua variabel berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik.	Jurnal Syntax Transformation, 2(5), 662-671. ISSN: 2721-2769.
13.	Muhammad Handy Rakhmawan & Tony Seno Aji.(2022). “Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur”.	- IPM - Tingkat Pengangguran Terbuka	- Pertumbuhan Ekonomi - Persentase Penduduk Miskin	Secara parsial IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara tingkat pengangguran terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan secara bersama-sama seluruh variabel berpengaruh terhadap kemiskinan.	Jurnal <i>INDEPEN DENT: Journal Of Economics</i> , 2(2), 34-46. ISSN: 2798-5008.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Putri Sari M J Silaban, Permata sari Br Sembiring, Vini Alvionita Br Sitepu, Jessica Putri Br Sembiring.(2021). “Pengaruh IPM dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2002- 2017”.	- IPM - Jumlah Penduduk Miskin	- PDRB	Secara bersama-sama seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Secara parsial IPM dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.	Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah. 4(1), 311- 321. ISSN: 2599-3410.
15.	Risqi Nurika Fatha Hidayati, Masruri Mughtar,Pardomu an Robinson Sihombing.(2022) . “Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Barat 2011-2021”	- PMDN - Jumlah Penduduk Miskin	- Pertumbuhan Ekonomi - PMA	Secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara PMA dan PMDN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat 2011-2021.	Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia, 2(2), 222- 228. ISSN: 2777-0028.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Melihat dari pandangan teori lingkaran setan yang diungkapkan oleh Nurkse, kemiskinan disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Pengangguran dapat diartikan sebagai akibat rendahnya produktivitas manusia. Karena pengangguran tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak menghasilkan pendapatan atau gaji. Oleh sebab itu, pengangguran memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, jika

pengangguran di wilayah tersebut meningkat, maka dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan di suatu daerah tersebut.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawan & Aji (2022) tentang Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur dengan probabilitas sebesar 0,0000. Adapun dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Nasruddin (2022) dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan dengan probabilitas sebesar 0,0452.

Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Sari, et al., (2021) dengan judul Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik dengan probabilitas sebesar 0,031.

### **2.3.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

IPM menggambarkan terpenuhinya atau tidak hak masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, akses pendidikan dan pendapatan. Jika hal ini terwujud, maka produktivitas masyarakat akan meningkat atau kualitas sumber

daya manusia meningkat. Ketika sumber daya manusia telah meningkat, maka mereka dapat lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tingkat pendapatan merupakan penentu kesejahteraan dalam masyarakat. Maka jika seseorang tidak bekerja atau menganggur hal tersebut dapat mengurangi penghasilan bahkan tidak memiliki penghasilan sama sekali. Situasi ini dapat menyebabkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dicapai akan memburuk.

Secara umum, IPM memiliki hubungan yang negatif dengan kemiskinan. Yang artinya yaitu, semakin tinggi IPM penduduk suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinan tersebut. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang baik maka orang tersebut tidak akan memiliki pendapatan yang menyebabkan daya belinya berkurang sehingga, hal tersebut masuk ke dalam lingkaran setan kemiskinan. Hal ini pun dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bahkan negara. Hal ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaban et al., (2021) dengan judul Pengaruh IPM dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2002-2017 yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2002-2017 dengan probabilitas sebesar 0.0183.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021) dengan judul Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik dengan probabilitas sebesar 0,032. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Laoh, et al.,

(2023) tentang Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan dengan probabilitas sebesar 0,022.

### **2.3.3 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Secara alami, pemerintah masing-masing negara berusaha menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu tujuan utama pengentasan kemiskinan adalah membangun infrastruktur dan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong jumlah investor berinvestasi di negara tersebut termasuk di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, penanaman modal dalam negeri berdampak negatif terhadap jumlah penduduk miskin di suatu negara. Efek negatif tersebut antara lain yaitu menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, peningkatan infrastruktur dalam pembuatan jalan untuk membantu pendistribusian ke tempat hasil produksi, dan meningkatkan produksi ekspor. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

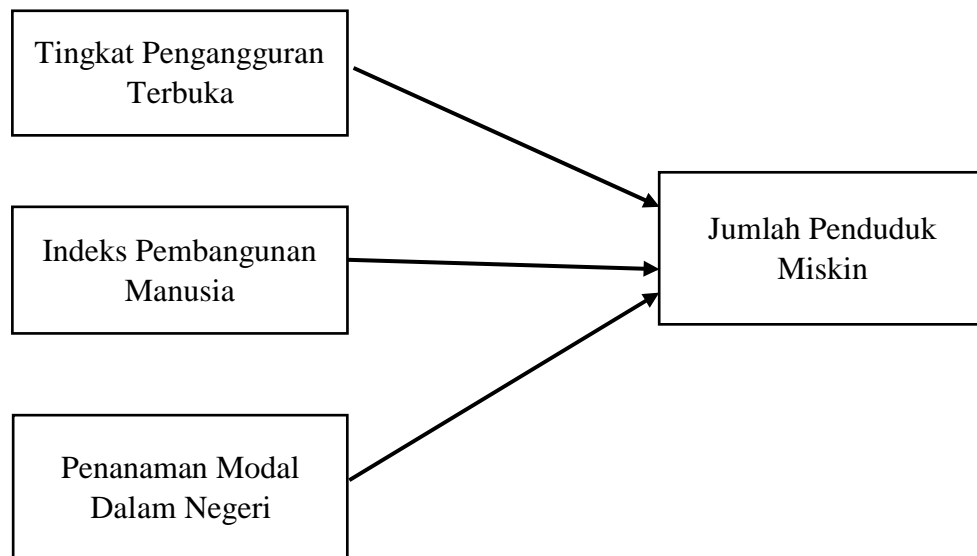
Konsep lingkaran kemiskinan pada dasarnya mengasumsikan bahwa ketidakmampuan menyalurkan tabungan yang cukup, kurangnya insentif untuk berinvestasi, relatif rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat merupakan tiga faktor utama yang menghambat pembentukan modal. dan pembangunan ekonomi di berbagai negara. Sesuai dengan teori, bahwa dengan

adanya penanaman modal dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dengan membangun infrastruktur dan meningkatkan pendidikan, kesehatan serta daya beli masyarakat. Dari hal tersebut dapat tersedianya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiganepdo & Soegoto (2022) dengan judul Peran PMDN dan PMA terhadap penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan bahwa PMDN memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas sebesar 0,0001.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, et al., (2022) tentang Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Barat 2011-2021 yang menunjukkan bahwa investasi (PMDN) memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap kemiskina di Provinsi Jawa Barat dengan probabilitas sebesar 0,102. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Saleh (2020) tentang Pengaruh Belanja Modal, Belanja Non Modal, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Kemiskinan Kalimantan Selatan yang menunjukkan bahwa PMDN memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan dengan probabilitas sebesar 0,5545.

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi negara, pemerintah harus bekerja secara aktif untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Yang diharapkan bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin saja, tetapi juga memerangi kemiskinan sampai ke akar permasalahannya. Dalam penelitian ini digunakan variabel bebas diantaranya tingkat pengangguran terbuka, indeks

pembangunan manusia, dan penanaman modal dalam negeri yang secara parsial diduga mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Diagram hubungan antara jumlah penduduk miskin dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran**

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban/dugaan sementara dari peneliti terhadap suatu masalah dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sementara indeks pembangunan manusia dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

2. Diduga tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal dalam negeri secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.